

ANALISIS PAGU INDIKATIF MAHKAMAH AGUNG



JUNI 2025

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis:

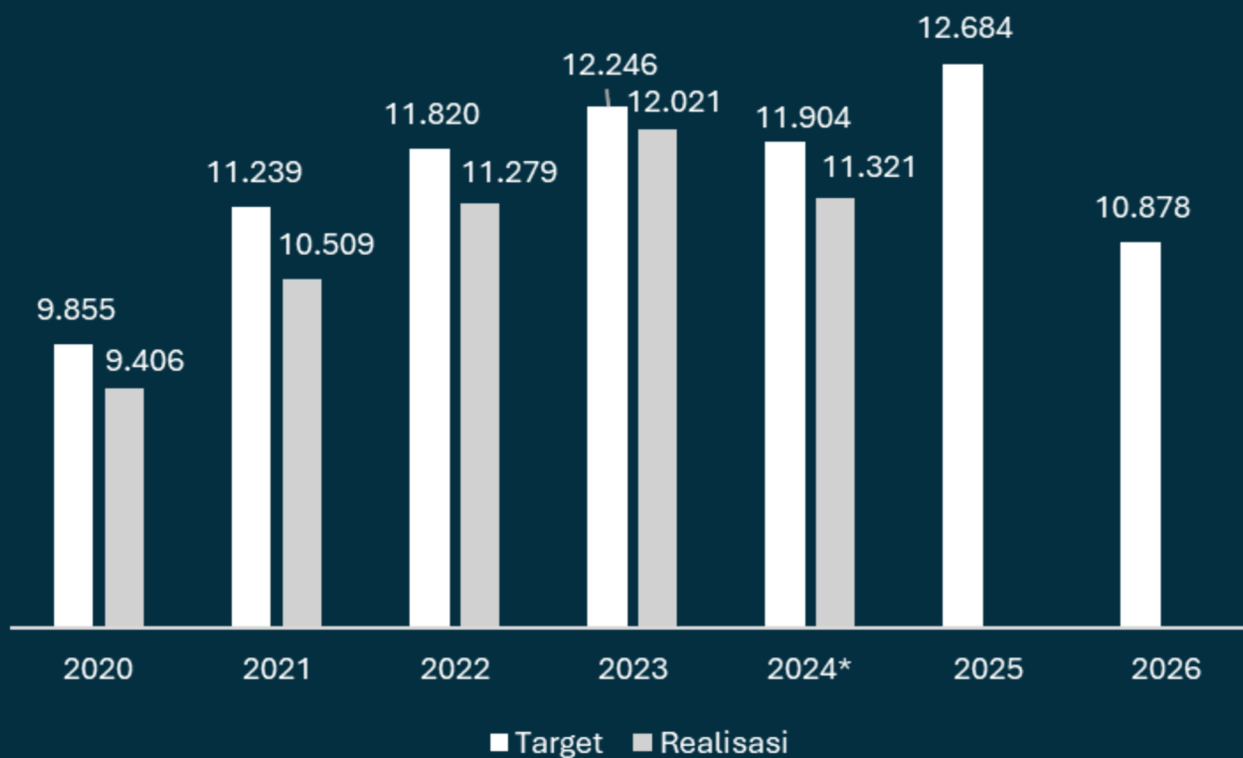
Tio Riyono S.E., Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si., Fachry Ali Firdaus, S.E.

Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2026	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
MA dalam RPJMN 2025-2029	05
Gaji Hakim Naik Hingga 280 persen	06
Rule of Law Index 2012-2024	07



(miliar rupiah)



Sumber: LKPP 2020-2023, NK APBN 2024-2025, KEM PPKF 2026

*) Outlook

Pagu Indikatif 2026

PROGRAM	APBN 2025	PAGU INDIKATIF 2026	%
Dukungan Manajemen	12.505,4	10.878,4	
Penegakan dan Pelayanan Hukum	178,8	-	
TOTAL	12.684,2	10.878,4	-14,2

Pagu Indikatif Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 sebesar Rp10.878 miliar, seluruhnya dialokasikan kepada Program Dukungan Manajemen.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut **menurun 14,2 persen** dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp12.684 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025.

Overview Anggaran 2020–2025

HALAMAN 3



Proporsi Terbesar Anggaran Dialokasikan pada Dukungan Manajemen

Anggaran terbesar MA 2020-2023 dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 85,8 persen. Proporsi ini semakin meningkat menjadi 98,4 persen (2024) dan 98,6 persen (2025).



Tidak dialokasikan anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2026

Pada dokumen KEM & PPKF 2026, alokasi anggaran MA seluruhnya untuk dukungan manajemen. Sedangkan untuk program Penegakan dan Pelayanan Hukum 0 persen. Tidak terdapat penjelasan atau keterangan lebih lanjut dalam dokumen tersebut terkait perubahan ini. Absennya informasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran dan keberlanjutan pelaksanaan fungsi inti MA dalam penegakan hukum serta pelayanan peradilan kepada masyarakat.



Tingkat Penyerapan Anggaran MA tinggi

Pada periode 2020–2023, Mahkamah Agung menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik dengan tingkat penyerapan selalu di atas 93 persen, bahkan mencapai 98,2 persen pada 2023. Tren positif ini berlanjut pada 2024 (*outlook*) dengan estimasi penyerapan sebesar 95,1 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta kemampuan MA dalam memanfaatkan dukungan APBN untuk mendukung tugas dan fungsi peradilan secara optimal.

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 4

Outcome	Output
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di MA
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
	Banding
	Kasasi
	PK
	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
	Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

MA dalam PN07 RPJMN 2025–2029

Dalam RPJMN 2025–2029, Mahkamah Agung berperan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang inklusif, transparan, dan akuntabel melalui percepatan penyelesaian perkara, perluasan akses keadilan bagi kelompok rentan, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penguatan bantuan hukum. MA juga mendorong keadilan restoratif, peningkatan eksekusi putusan, dan transformasi digital guna mendukung layanan peradilan yang lebih responsif dan terpercaya.

PRIORITAS NASIONAL (PN)

Asta Cita 7 (PN 07)
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

PROGRAM PRIORITAS (PP)

07.03 Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

SASARAN PROGRAM PRIORITAS

01. Terwujudnya lembaga dan penegak hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel

INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS

01. Indeks Kelembagaan Hukum
 02. Indeks Penegakan Hukum

KEGIATAN PRIORITAS (KP)

07.03.01 Penguatan Kelembagaan Hukum

SASARAN KEGIATAN PRIORITAS

01. Terwujudnya lembaga penegak hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel

INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

01. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum

Gaji Hakim Naik hingga 280 Persen

Klasifikasi	Gaji Pokok (Rp)		Tunjangan Jabatan (Rp)		Peningkatan
	PP No. 94 Tahun 2012	PP No. 44 Tahun 2024	PP No. 94 Tahun 2012	PP No. 44 Tahun 2024	
Tertinggi	4.978.000	6.373.200	40.200.000	56.500.000	Kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan ±40%
Terendah	2.064.100	2.785.700	8.500.000	11.900.000	

Kenaikan Tahun 2024

Klasifikasi	Gaji Pokok (Rp)		Tunjangan Jabatan (Rp)		Peningkatan
	PP No. 44 Tahun 2024	Rencana Kenaikan	PP No. 44 Tahun 2024	Rencana Kenaikan	
Tertinggi	6.373.200	7.799.960*	56.500.000	-	Rencana Kenaikan Gaji Pokok 280%
Terendah	2.785.700	17.844.960*	11.900.000	-	

Rencana Kenaikan Tahun 2025

*) Disampaikan Presiden RI pada Kamis, 12 Juni 2025

➔ Fokus Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Hakim

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan skema gaji pokok dan tunjangan hakim melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hakim sekaligus mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan akuntabel. Belum berselang lama sejak kebijakan tersebut berlaku, Presiden Prabowo Subianto kembali mengumumkan rencana kenaikan gaji pokok hakim secara signifikan hingga mencapai 280 persen. Kebijakan ini merupakan langkah progresif pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan terkait integritas dan kinerja hakim, yang selama ini kerap dikaitkan dengan rendahnya kesejahteraan serta besarnya beban kerja hakim. Dengan perbaikan signifikan pada aspek kesejahteraan hakim ini, diharapkan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup para hakim, tetapi juga mampu mendorong integritas dan independensi peradilan, sehingga secara bertahap mampu memperbaiki persepsi publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan di Indonesia

Rule of Law Index 2012–2024

Government officials in the judicial branch do not use public office for private gain



Sumber: World Justice Project, 2025

➔ Penguatan Integritas Peradilan dan Tantangan Indeks Rule of Law Indonesia

Grafik *Rule of Law Index* menunjukkan bahwa integritas aparat peradilan Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata ASEAN, dengan skor Indonesia hanya mencapai 0,33 pada 2024, jauh di bawah ASEAN yang stabil di atas 0,45. Ini mencerminkan masih kuatnya persepsi penyalahgunaan jabatan di lingkungan yudisial. Dalam situasi ini, Mahkamah Agung memegang peran kunci untuk memperkuat integritas melalui reformasi digital, pengawasan internal, dan transparansi proses peradilan. Kenaikan gaji hakim yang signifikan juga perlu disertai penguatan etika dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks ini.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)